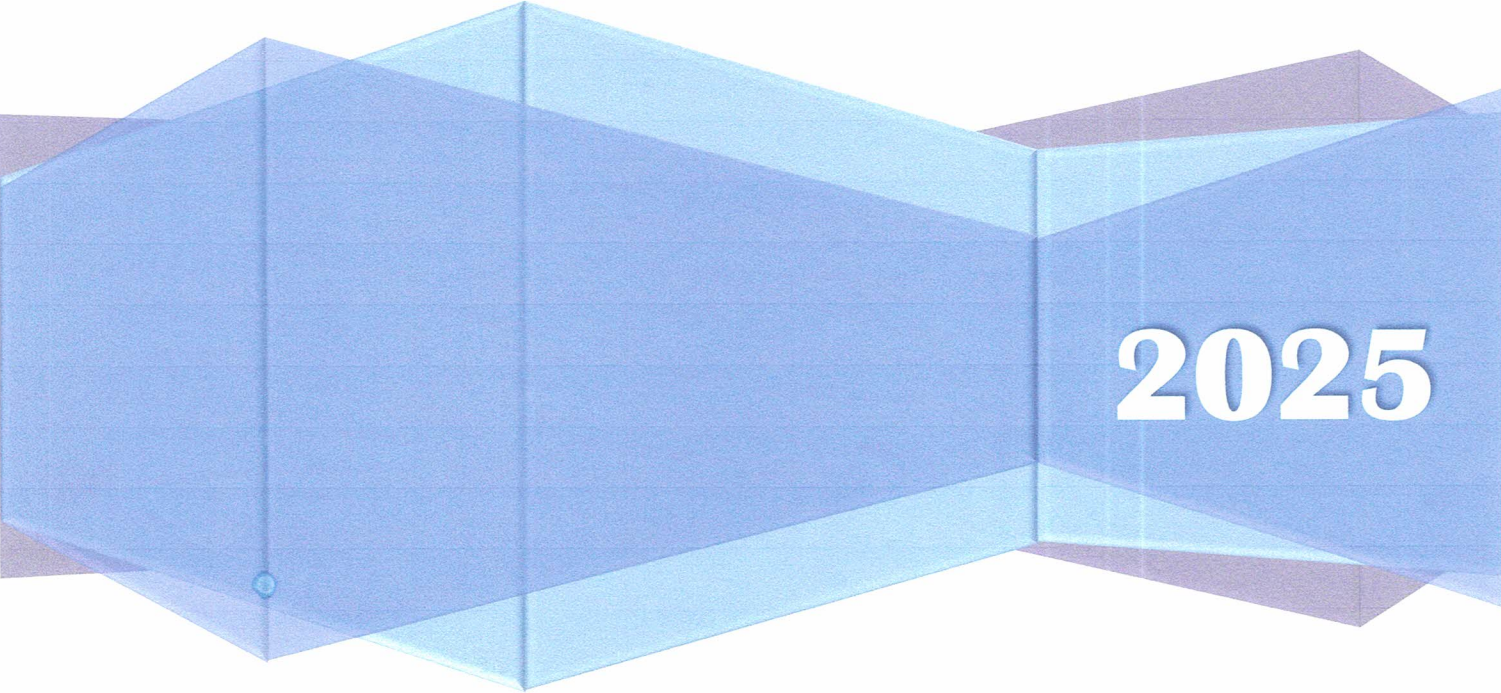




**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

LAPORAN MONITORING KINERJA

Triwulan I 2025



2025

**LAPORAN MONITORING KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PERIODE TRIWULAN I
TAHUN 2025**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- Laporan Bulanan Perkara Periode Januari 2025
- Laporan Bulanan Perkara Periode Februari 2025
- Laporan Bulanan Perkara Periode Maret 2025
- SIPP PTUN Samarinda per 27 Maret 2025
- Ecourt PTUN Samarinda per 27 Maret 2025

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Persentase)	Target	Realisasi (Persentase)	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai	Persentase Capaian	Keterangan
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	4	100%	4	Tercapai	117,65%	Perkara Putus Triwulan I 2025 = 4 Perkara, Perkara Putus yang tepat waktu = 4 Perkara
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	50%	4	50%	2	Tercapai	100%	Perkara Putus Triwulan I 2025 = 4 Perkara, Perkara Putus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi = 2 Perkara
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	93,52	93,52	Tercapai	103,91%	Jumlah Responden IKM / Kepuasan Pelayanan Publik s.d Triwulan I = 30 Reponden
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	4	100%	4	Tercapai	105,26%	salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu = 4
	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	0	0,00%	0	Tidak Tercapai	0,00%	Tidak terdapat perkara prodeo pada Triwulan I 2025
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	26	100%	26	Tercapai	105,26%	Jumlah Pencari keadilan yang mendapat layanan Posbakum Triwulan I 2025 = 26 orang

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	50%	1	100%	1	Tercapai	200%	Jumlah Perkara BHT Triwulan I = 4 perkara, Perkara BHT Triwulan I 2025 yang diajukan eksekusi = 1 perkara dan perkara yang ditindaklanjuti Triwulan I tahun 2024 = 1 perkara.
--	--	-----	---	------	---	----------	------	---

[illegible]

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 5.286.881.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 718.250.000,-
3	Peningkatan Manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara	Rp. 81.635.000,-

Samarinda, 10 April 2025
Wakil Ketua,



RAJAN SIHITE, S.H., M.H.
NIP. 19700427 199603 2 004